

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan yang ada saat ini belum ada satupun regulasi yang dibuat untuk mengatur tentang gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia meskipun dalam prakteknya gugatan *citizen lawsuit* sudah pernah diajukan dan hanya diterima namun hanya pada lingkup peradilan umum. Oleh sebab itu, gugatan *citizen lawsuit* harus diakui dan dikodifikasikan keberadaannya dalam peradilan di Indonesia agar tidak terjadi kekosongan yang terjadi akibat ketiadaan peraturan tertulis dan agar hukum selalu mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan penafsiran dengan menggunakan metode penafsiran teleologis dan metode penafsiran sistematis terhadap Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan TUN dianggap kompeten dan sangat berpeluang untuk menerima gugatan *citizen lawsuit*, namun sampai saat ini Peradilan TUN belum dapat menerima gugatan *citizen lawsuit* dikarenakan belum ada regulasi konkrit yang dibuat untuk memberikan kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima gugatan *citizen lawsuit*.

Politik Hukum Tentang pengaturan Gugatan *citizen lawsuit* melalui Peradilan Tata Usaha negara sangatlah penting agar dapat mengatur secara eksplisit tentang tata cara gugatan *citizen lawsuit* sehingga hal tersebut dapat dijadikan acuan serta

dasar bagi warga negara untuk mengontrol setiap keputusan Pemerintah melalui peradilan TUN.

B. Saran

Berdasarkan penafsiran dengan menggunakan metode penafsiran teleologis dan metode penafsiran sistematis terhadap Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, maka dalam penulisan ini, penulis menyarankan perlu adanya Politik Hukum Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia secara komperhensif yang nantinya dapat memberikan kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat juga menerima gugatan *citizen lawsuit*.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqie, Jimly. 2013. *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2013. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Pres.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Djojodirjo, MA. Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wisnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hackett, Steven C. 2011. *Environmental and Natural Resource Economic: Theory, Policy, and the Sustainable Society*. London & New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Hartono Sunaryati. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. 1998. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Jakarta: Peradaban.

Hoft, Ph Visert. 2011. *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahyangan.

HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Isrok, Rizki Emil Birham. 2010. *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Warga Negara*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Isharyanto, Aryoko Abdurrachman. 2016. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*. Jakarta: Moeka Publishing.

Juliardi, Budi. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Kansil, CST. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Keeton, W. Page. 1984. *Prosser and Keeton on Torts*. USA: West Publishing.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Mahkamah Agung RI. 2009. *Class Action & Citizen Law suit* (Laporan Penelitian).

M, Ali Abdullah. 2014. *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta: Prenada Media Group.

- MD, Moh. Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Cetakan I. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Miller, Valerie, Jone Covey. 2005. *Buku Pedoman Advokasi Kerangka Kerja Untuk Perencanaan, Bertindak dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moh, Utrecht. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Cetakan kesepuluh, Jakarta: Saleh Djindang.
- Nasution, S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Nugroho, Adi Susanti. 2010. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Susanti Adi. 2010. *Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Santosa, Ahmad. 2001. *Good Governance Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.
- Santosa, Mas Achmad. 1997. *Hak Gugat Organisasi Lingkungan*. Jakarta: ICEL.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Lakhan Pressindo.
- Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, Rachmat. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abardin.
- Simanjuntak, Enrico. 2018. *Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mahmudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sundari, E. 2002. *Pengajuan Gugatan Secara Class Action: Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Susanti, Dyah Octorina, A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari. 2010. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thohari, A. Ahsin, Imam Syaukani. 2015. *Dasar-dasar Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Utrecht, E. 1956. *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Cetakan keenam). Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ihtiar.

Uzair Fauzan, Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wantu, Fence M. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: REVIVA CENDEKIA.

Wahyudi, Alwi. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyono, Padmo. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*. Jakarta: Ghalia.

W. Riawan Tjandra. 2009. *Demokrasi Melawan Kekuasan*, Yogyakarta; Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Wiyono, R. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

Vollmar. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: C.V. Rajawali.

Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

II. Jurnal

Campbell, Jonathan S. 2000. *Has the Citizen Suit Provision of the Clean Water Act Exceeds its Supplemental Birth?*. William & Mary Environmental Law and Policy Review: Vol. 24.

Fatah, Abdul. 2013. *Gugatan Warga Negara sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jurnal Yuridika: Vol. 28, No. 3.

Khalid, Afif. 2014. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jurnal Al'Adl: Vol. VI. No. 11.

Utama, Yos Johan. 2007. *Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan Dalam Perkara Administrasi Negara (Suatu studi Kritis Terhadap Penggunaan Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Peradilan administrasi)*. Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 10, No. 1.

III. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan
Perwakilan Kelompok

